

**PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP *GOOD GOVERNMENT  
GOVERNANCE* DI DIREKTORAT METROLOGI BANDUNG**

Rukmi Juwita, Elsa Prajameta

witawilanggana@rocketmail.com, [elsaaprajameta97@gmail.com](mailto:elsaaprajameta97@gmail.com)

Diploma IV Akuntansi Keuangan, Politeknik Pos Indonesia

**ABSTRACT**

Direktorat Metrologi Bandung adalah institusi pemerintahan dibawah kementerian perdagangan yang bergerak dalam menangani kegiatan metrologi legal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal terhadap *good government governance*. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif asosiatif. Hasil analisis disimpulkan hipotesis pertama tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara standar akuntansi pemerintahan terhadap *good government governance*, hipotesis kedua tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap *good government governance*.

**Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian, *Good Government Governance***

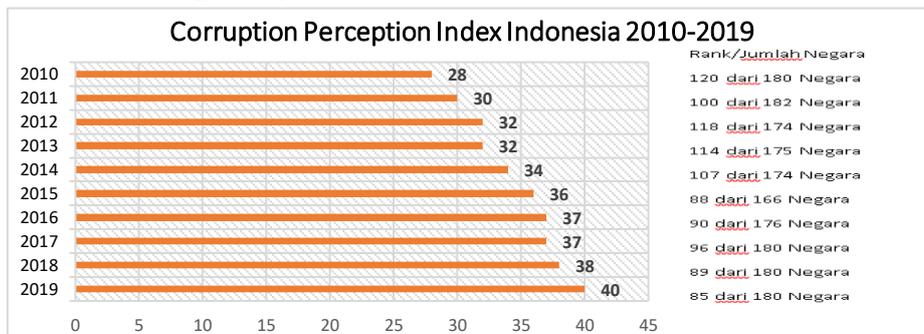
**ABSTRACT**

*Directorate of Metrology Bandung is government institution under the Ministry of Trade which is handling legal metrology activities. The purpose of this research was to determine the effect of government accounting standards and internal control systems on good government governance. The method used in this research is associative quantitative. The results of the analysis concluded that the first hypothesis there is no significant influence between government accounting standards on good government governance, the second hypothesis there is no significant influence between the internal control system on good government governance.*

**Keywords: Government Accounting Standards, Internal Control Systems, *Good Government Governance*.**

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang mengalami jatuh bangun dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya Untuk mencapai keberhasilan *Good Government Governance* (GGG) atau tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi perilaku yang berkarakteristik *good governance*. Pelaksanaan prinsip *good governance* adalah salah satu cara untuk menciptakan keadaan politik, ekonomi dan social yang stabil. Selain pemerintahan yang turut andil dalam *Good Government Governance* (GGG), masyarakat juga memiliki peran dalam partisipasi kebijakan dari pemerintah. Untuk merealisasikan *Good Government Governance* (GGG) sendiri merupakan tantangan berat yang dihadapi pemerintahan. Kerana kenyataan di lapangan masih terjadi banyak penyalahgunaan wewenang oleh pelaksana pelayanan di Indonesia ini yang merugikan masyarakat. Masih banyak terjadinya KKN atau korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kegiatan dan tindakan dalam pemerintahan. Hal itu ditunjukkan dengan hasil survei terkait *Corruption Perception Index* yang dilakukan oleh *Transparency Internasional* (TI) dari tahun 2011-2019

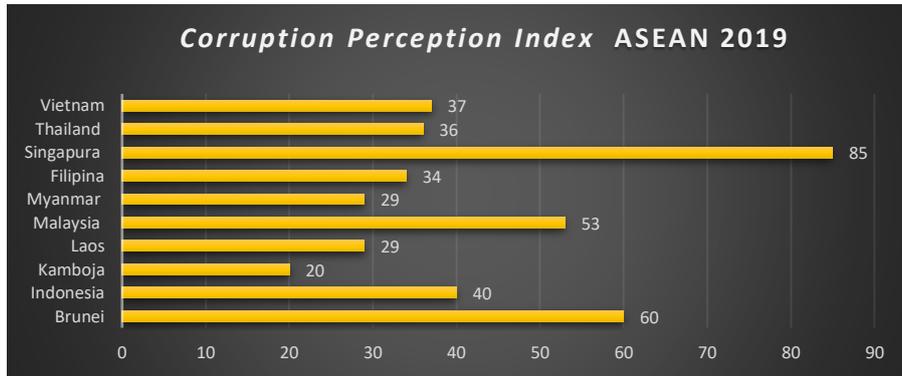


Gambar 1 *Corruption Perception Index* Indonesia 2010-2019

Sumber: *Transparency Internasional*

Dari hasil survei *Transparency Internasional* (TI) semakin mendekati angka 0 maka artinya semakin tinggi angka korupsi di suatu negara dan semakin mendekati angka 100 maka semakin bebas korupsi suatu negara tersebut. Dapat dilihat dalam gambar di atas perkembangan *Corruption Perception Index* Indonesia semakin meningkat sedikit demi sedikit. Namun jika dilihat dari angkanya masih sangat jauh menuju 100 menggambarkan masih tingginya angka korupsi di Indonesia. Tapi dengan semakin meningkatnya angka *Corruption Perception Index* Indonesia dapat mencerminkan usaha KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia. Dengan rendahnya angka *Corruption Perception Index* negara Indonesia juga menggambarkan implementasi *Good Government Governance* (GGG) masih kurang maksimal. Jika dilihat dari angka *Corruption Perception Index* di negara-negara ASEAN, Indonesia bukanlah satu-satunya negara dengan angka *Corruption Perception Index* yang rendah. Dapat kita lihat di dalam gambar di bawah ini *Corruption Perception Index* negara ASEAN pada tahun 2019.

Gambar 2 *Corruption Perception Index ASEAN 2019*



Dari gambar di atas dapat kita lihat angka *Corruption Perception Index* Indonesia masih di bawah negara Malaysia, Brunei dan Singapura. Angka *Corruption Perception Index* terbesar di negara ASEAN di raih oleh negara Singapura dengan angka 85 di ranking 3 dari 180 negara yang di survei oleh *Transparency International*. Seharusnya Indonesia bisa menjadikan sebuah motivasi dengan melihat keberhasilan negara tetangga yang dapat mencapai angka *Corruption Perception Index* yang baik. Dalam mendukung mencapai *Good Government Governance* (GGG) di Indonesia pemerintah mengeluarkan peraturan terkait akuntansi pemerintahan yaitu PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. “Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah” (PP No. 71 Tahun 2010). “SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) merupakan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur sistem pelaporan keuangan dan akuntansi pemerintah, yang terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian Negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyusun laporan keuangan.” Abdul Hakim dalam (Jati, 2019)

Dikutip dari (Palembang Humas, 5 Mei 2020) “Dengan dilaksanakan kegiatan pra rekonsiliasi ini output yang diharapkan adalah untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang berkualitas, yakni Laporan Keuangan yang akuntabel dan transparan serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.”

Namun kenyataan di lapangan sekarang ini masih banyak terdapat lemahnya sistem pengendalian internal. Dikutip dari (TEMPO.CO, 2020) “Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) mengungkap 4.094 temuan yang memuat 5.480 permasalahan dalam pemeriksaan BPK di semester II tahun 2019. Dari semua permasalahan itu, Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan ada 1.725 atau 31 persen permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 6,25 triliun. Di samping itu, ada pula 2.784 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan sebesar Rp1,35 triliun; serta 971 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern. Apabila dijumlahkan permasalahan itu adalah sebesar Rp 7,6 triliun.”

Dari kutipan di atas dapat di buktikan dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester yang dilakukan oleh BPK yang telah dikumpulkan dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan

Semester 1 tahun 2018 sampai Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 tahun 2019 terkait jumlah permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1 Jumlah Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal**

Berdasarkan tabel di atas, dapat di lihat masih banyak permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal di pemerintahan pusat, pemerintahan daerah maupun di BUMN dan badan lainnya. Terutama di pemerintahan daerah terdapat permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal paling banyak di banding di sektor lain. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang pernah

Tahun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester	Jumlah Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal			Total Permasalahan
	Pemerintahan Pusat	Pemerintahan Daerah	BUMN & Badan Lainnya	
2018 Semester 1	998	6.222	319	7.539
2018 Semester 2	330	511	362	1.203
2019 Semester 1	987	5.858	391	7.236
2019 Semester 2	304	514	153	971

dilakukan sebelumnya oleh (Yusniyar, 2016) berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan Pengendalian Intern Terhadap *Good Governance* Dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Skpa Pemerintah Aceh)” yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengendalian intern secara parsial berpengaruh positif terhadap *good governance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, semakin tinggi pengendalian intern yang dilakukan pada setiap SKPA di Pemerintah Aceh, maka semakin tinggi pula terciptanya prinsip-prinsip *good governance*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Dhiyavani et al., 2017) berjudul “Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penerapan *Good Governance*” yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Hal ini berarti SKPD Kota Pekanbaru belum memenuhi sistem pengendalian internal pemerintah yang memadai sehingga tidak mempengaruhi penerapan *good governance*. Implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Hal ini berarti standar akuntansi pemerintah membantu pemerintah mempengaruhi penerapan *good governance*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Saputri, 2018) berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Penerapan *Good Governance* (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah/Opd Kabupaten Wonogiri)” yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa Sistem pengendalian *Intern* pemerintah berpengaruh positif terhadap *good governance*. Standar akuntansi pemerintahan (SAP) berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Sari, 2013) berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Penelitian Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Barat Dan Banten)” yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa Sistem pengendalian intern pemerintah, implementasi standar akuntansi pemerintahan,

penyelesaian temuan audit berpengaruh positif terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Nelson, 2016) berjudul “*Exploring Monitoring and Evaluation within a Good Governance perspective: A case study of Stellenbosch Municipality*” yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemerintah perlu mengimplementasikan proses yang memanfaatkan aspek-aspek *monitoring & evaluation* dan kerangka kerja evaluasi nasional yang baru dikembangkan dalam lingkungan pemerintah daerah. Selain itu, sementara tidak ada satu pun langkah yang dapat dilihat sebagai solusi untuk tantangan tata kelola saat ini, P&E menawarkan kesempatan untuk bergerak ke arah tata kelola dalam pemerintah daerah yang juga dianggap baik.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih banyak dilakukan di pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. Penelitian dari penulis memiliki kelebihan yaitu melakukan penelitian di badan yang berada di bawah Kementerian Perdagangan Indonesia yaitu Direktorat Metrologi Bandung. Yang menurut penulis tidak begitu banyak masyarakat luas memperhatikan bagaimana pelayanan yang ada di Direktorat Metrologi ini. Namun, Direktorat Metrologi memiliki peran sangat penting dalam menjaga metrologi legal di Indonesia terutama untuk kota Bandung. Selain itu penelitian diharapkan dapat menambah kesadaran pembaca akan adanya Direktorat Metrologi badan yang memiliki peran penting dalam standarisasi alat ukur dan timbang. Karena pada nyatanya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu Direktorat Metrologi.

#### **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap *Good Government Governance* di Direktorat Metrologi Bandung?
1. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap *Good Government Governance* di Direktorat Metrologi Bandung?
2. Bagaimana pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap *Good Government Governance* di Direktorat Metrologi Bandung?

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kuantitatif. (Sugiyono, 2019:16) menyatakan “Metode kuantitatif disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik”. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan bentuk hubungan kausal. Menurut (Sugiyono, 2019:65-66), “Assosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat tiga bentuk hubungan yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan *interaktif/ resiprocal/* timbal balik”. Sedangkan “Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Disini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi)”. Peneliti menggunakan alat analisis regresi berganda.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer sebagai sumber data, yaitu dengan pemberian kuesioner mengenai data yang dibutuhkan dalam penelitian secara langsung kepada responden. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* yang digunakan adalah *sampling total*. sampel dalam penelitian ini adalah karyawan pengelola keuangan yang berada di enam Sub Bagian di Direktorat Metrologi Bandung yaitu: Subdirektorat Sarana dan Kerja Sama; Subdirektorat Kelembagaan dan Penilaian; Subdirektorat UTTP dan Standar Ukuran; Subdirektorat Sumber Daya Manusia; Subdirektorat Pengawasan; dan Subbagian Tata Usaha. Analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas data, analisis kolerasi *spearman rank*, uji kolerasi berganda, analisis regresi berganda, koefisien determinasi, uji kolerasi berganda, uji t dan

uji f.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

Dalam penelitian ini, pengujian validitas berupa kuesioner yang terdiri atas 19 pernyataan dengan pembagian 5 pernyataan untuk Standar Akuntansi Pemerintahan (X1), 5 pernyataan Sistem Pengendalian Internal (X2) dan 9 pernyataan *Good Government Governance* (Y). Pada penelitian ini sampel berjumlah 32 responden. Sehingga diperoleh r tabel sebesar 0,349 ( $\alpha=5\%$ ).

Berdasarkan tabel hasil uji validitas, seluruh item pernyataan pada variabel X1, X2 dan Y dinyatakan valid karena hasil r hitung lebih besar daripada r tabel (0,349). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebanyak 19 pernyataan dalam kuesioner ini telah valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

### Uji Reliabilitas

**Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas Reliabilitas Standar Akuntansi Pemerintahan(X1), Sistem Pengendalian Internal (X2) dan *Good Government Governance* (Y)**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Standarized Alpha</i>	Keterangan
SAP (X1)	0,823	0,60	Reliabel
SPI (X2)	0,744	0,60	Reliabel
GGG (Y)	0,802	0,60	Reliabel

Sumber: Pengolahan data SPSS

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar 0,823 , nilai *Cronbach's Alpha* Sistem Pengendalian Internal sebesar 0,744 dan nilai *Cronbach's Good Government Governance* sebesar 0,802. Hal ini menunjukkan bahwa, nilai ini telah melewati syarat reliabilitas sebesar 0,60. Maka dapat dikatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan *Good Government Governance* adalah reliabel.

### Uji Normalitas

Berdasarkan hasil analisis uji normalitas yang mengacu pada kolom Kolmogorov-Smirnova menunjukkan bahwa Variabel Y *Good Government Governance*, Variabel X1 Standar Akuntansi Pemerintahan, Variabel X2 Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai Sig. sebesar 0,200. Dimana angka tersebut menunjukkan  $0,200 \geq 0,05$  maka dari hasil data tersebut dapat disimpulkan berdistribusi normal.

### Analisis Korelasi Spearman Rank

Berdasarkan hasil analisis korelasi yang menunjukkan angka 0,216. Maka dapat dilihat pada tabel bahwa r berada diantara 0,20 – 0,399 artinya memiliki hubungan yang rendah. Dengan demikian dapat dikatakan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) memiliki hubungan yang lemah terhadap *Good Government Governance* (Y).

Berdasarkan hasil analisis korelasi yang menunjukkan angka 0,023. Maka dapat dilihat pada tabel bahwa  $r$  berada diantara 0,20 – 0,399 artinya memiliki tingkat hubungan yang sangat rendah. Dengan demikian dapat dikatakan Sistem Pengendalian Internal (X2) memiliki tingkat hubungan yang sangat rendah terhadap *Good Government Governance* (Y).

### Uji Regresi Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda hasil pengolahan data menggunakan SPSS 25.00, maka didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 24,671 - 0,262 X_1 + 0,061 X_2$$

Dimana;

Y = *Good government governance*

a = Konstanta

$b_1b_2$  = Koefisien Regresi

X1 = Standar Akuntansi Pemerintahan

X2 = Sistem Pengendalian Internal

Dari persamaan tersebut, dapat diartikan sebagai berikut:

Konstanta (a)

Jika variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) dan Sistem Pengendalian Internal (X2) nilainya 0, maka nilai variabel *Good government governance* (Y) adalah sebesar 24,671

Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) terhadap *Good government governance* (Y)

Koefisien regresi variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) sebesar 0,262 artinya jika variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) mengalami kenaikan 1, maka *good government governance* (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,262. Karena koefisien bernilai positif maka terjadi hubungan positif pula antara Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) terhadap *good government governance* (Y). Jadi, kenaikan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) mengakibatkan peningkatan pada *Good government governance* (Y).

Sistem Pengendalian Internal (X2) terhadap *Good government governance* (Y)

Koefisien regresi variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) sebesar 0,061 artinya jika variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) mengalami kenaikan 1, maka *Good government governance* (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,061. Karena koefisien bernilai positif maka terjadi hubungan positif pula antara Sistem Pengendalian Internal (X2) terhadap *Good government governance* (Y). Jadi, kenaikan Sistem Pengendalian Internal (X2) mengakibatkan peningkatan pada *Good government governance* (Y).

### Analisis Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi, menunjukkan bahwa nilai dari koefisien determinasi memiliki nilai 0,036. Berikut perhitungan secara manual untuk mendapatkan *R square*:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,036 \times 100\%$$

$$KD = 3,6\%$$

Dari perhitungan diatas dapat diketahui nilai R square atau koefisien determinasi adalah 0,036, maka nilai tersebut mempunyai arti bahwa sebesar 3,6 % variasi dari variabel *good government governance* dapat dipengaruhi oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) dan Sistem Pengendalian Internal (X2). Sedangkan sisanya yaitu 0,964 atau 96,4% dari variabel *good government governance* dipengaruhi oleh variabel lainnya (faktor lain) yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini

### Uji Korelasi Berganda

Berdasarkan hasil analisis korelasi berganda, maka didapatkan angka R sebesar 0,189. Berdasarkan hasil uji tersebut dapat dijelaskan merujuk pada tabel kategori koefisien korelasi yang mana masuk pada interval korelasi (0,00 – 0,199) maka disimpulkan tingkat hubungan korelasi berganda dari standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal terhadap *good government governance* mempunyai tingkat hubungan yang sangat lemah.

### Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis statistik t (parsial), yang didasari dari teori harga t hitung selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dan tingkat signifikansi 5% maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

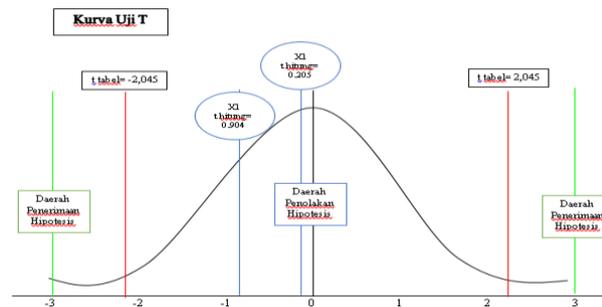
Melakukan hipotesis pengujian standar akuntansi pemerintahan(X1) terhadap *good government governance* (Y).

Berdasarkan hasil analisis pengujian standar akuntansi pemerintahan terhadap *good government governance* maka didapatkan angka sebesar  $t_{hitung} = 0,904$  karena menggunakan uji 2 pihak, dengan dk atau derajat kebebasan sebesar 29 yang didapat dari  $(df) = n-k-1$  atau  $(32-2-1)$  dan didapat  $t_{tabel}$  sebesar 2,045. Maka analisis uji t tersebut dapat dituliskan  $t_{hitung}(0,904) < t_{tabel}(2,045)$ , dikarenakan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan angka signifikansi sebesar  $0,374 > 0,05$  yang mana dapat ditarik kesimpulan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara standar akuntansi pemerintahan terhadap *good government governance* di Direktorat Metologi Bandung.

Melakukan hipotesis pengujian sistem pengendalian internal (X2) terhadap *good government governance* (Y).

Berdasarkan hasil analisis pengujian sistem pengendalian internal terhadap *good government governance* maka didapatkan angka sebesar  $t_{hitung} = (0,205)$ , karena menggunakan uji 2 pihak, dengan dk atau derajat kebebasan sebesar 29 yang didapat dari  $(df) = n-k-1$  atau  $(32-2-1)$  dan didapat  $t_{tabel}$  sebesar 2,045. Maka analisis uji t tersebut dapat dituliskan  $t_{hitung} (0,205) < t_{tabel} (2,045)$ , dikarenakan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan angka signifikansi sebesar  $0,839 > 0,05$  yang mana dapat ditarik kesimpulan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap *good government governance* di Direktorat Metologi Bandung.

Maka dapat di gambarkan kurva sebagai berikut:



### Uji Hipotesis Statistik F (Simultan)

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis statistik f (simultan, yang didasari dari teori harga f hitung selanjutnya dibandingkan dengan f tabel dan tingkat signifikansi 5% maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Melakukan pengujian hipotesis secara simultan berdasarkan nilai signifikansi. Dari hasil output uji diatas menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,589 yang mana didalam teori pengambilan keputusan  $0,589 > 0,05$  maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan taraf signifikansinya  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan pengujian standar akuntansi pemeritahan dan sistem pengendalian internal terhadap *good government governance* di Direktorat Metrologi Bandung.
2. Melakukan pengujian hipotesis secara simultan berdasarkan nilai f hitung dengan f tabel. Dari hasil output uji diatas menghasilkan f hitung sebesar 0,540 yang mana di dalam teori pengambilan keputusan f hitung  $0,540 < 3,33$  maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan nilai f hitung dan f tabel  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan pengujian standar akuntansi pemeritahan dan sistem pengendalian internal terhadap *good government governance* di Direktorat Metrologi Bandung.

### PEMBAHASAN

Pada penelitian ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan data primer yang menggunakan kuesioner yang disebar di Direktorat Metrologi Bandung Berikut pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

#### **Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap *Good Government Governance* di Direktorat Metrologi Bandung**

Penelitian ini menggunakan sumber data yang didapat dari data primer dari Direktorat Metrologi Bandung. Berikut pembahasan hasil penelitian standar akuntansi pemerintahan terhadap *good government governance* sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis uji korelasi *spearman rank* didapatkan angka sebesar 0,216. Berdasarkan hasil analisis korelasi yang menunjukkan angka 0,216. Maka dapat dilihat pada tabel bahwa r berada diantara 0,20 – 0,399 artinya memiliki hubungan yang rendah. Dengan demikian dapat dikatakan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) memiliki hubungan yang lemah *Good Government Governance* (Y). Dengan lemahnya hubungan antar Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap *Good Government Governance*, penerapan kedua variabel harus di

tingkatkan agar terjadi hubungan yang kuat. Dengan meningkatkan penerapan indikator – indikator kedua variabel.

2. Berdasarkan hasil uji analisis regresi berganda yang dilakukan dengan menghasilkan sebuah persamaan  $Y = 24.671 - 0,262 X1 + 0,061 X2$  yang menjelaskan bahwa jika variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) mengalami kenaikan 1, maka *Good government governance* (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,262. Karena koefisien bernilai positif maka terjadi hubungan positif pula antara Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) terhadap *good government governance* (Y). Maka dari itu untuk meningkatkan penerapan terhadap *good government governance* harus dengan meningkatkan penerapan dari Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Berdasarkan hasil uji hipotesis statistik t didapatkan angka sebesar  $t_{hitung}(0,904) < t_{tabel}(2,045)$ , dikarenakan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan angka signifikansi sebesar  $0,374 > 0,05$  yang mana dapat ditarik kesimpulan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara standar akuntansi pemerintahan terhadap *good government governance* di Direktorat Metrologi Bandung. Dengan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara standar akuntansi pemerintahan terhadap *good government governance* di Direktorat Metrologi Bandung, penerapan kedua variabel harus di tingkatkan agar terdapat pengaruh yang signifikan.

Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Saputri, 2018) dimana penelitiannya berkesimpulan bahwa Standar akuntansi pemerintahan (SAP) berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance*.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap *Good Government Governance* di Direktorat Metrologi Bandung**

Penelitian ini menggunakan sumber data yang didapat dari data primer dari Direktorat Metrologi Bandung. Berikut pembahasan hasil penelitian standar akuntansi pemerintahan terhadap *good government governance* sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis uji korelasi *spearman rank* didapatkan angka sebesar angka 0,023. Maka dapat dilihat pada tabel bahwa  $r$  berada diantara 0,20 – 0,399 artinya memiliki tingkat hubungan yang sangat rendah. Dengan demikian dapat dikatakan Sistem Pengendalian Internal (X2) memiliki tingkat hubungan yang sangat rendah *Good Government Governance* (Y). Dengan lemahnya hubungan antar Sistem Pengendalian Internal terhadap *Good Government Governance*, penerapan kedua variabel harus di tingkatkan agar terjadi hubungan yang kuat. Dengan meningkatkan penerapan indikator – indikator kedua variabel.
2. Berdasarkan hasil uji analisis regresi berganda yang dilakukan dengan menghasilkan sebuah persamaan  $Y = 24.671 - 0,262 X1 + 0,061 X2$  yang menjelaskan bahwa jika variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) sebesar 0,061 artinya jika variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) mengalami kenaikan 1, maka *Good government governance* (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,061. Karena koefisien bernilai positif maka terjadi hubungan positif pula antara Sistem Pengendalian Internal (X2) terhadap *Good government governance* (Y). Maka dari itu untuk meningkatkan penerapan terhadap *good government governance* harus dengan meningkatkan penerapan dari Sistem Pengendalian Internal.
3. Berdasarkan hasil uji hipotesis statistik t didapatkan angka sebesar  $t_{hitung}(0,205) < t_{tabel}(2,045)$ , dikarenakan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan angka signifikansi sebesar  $0,839 > 0,05$  yang mana dapat ditarik kesimpulan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap *good government governance* di Direktorat Metrologi Bandung. Dengan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap *good government governance* di Direktorat Metrologi Bandung, penerapan kedua variabel harus di tingkatkan agar terdapat pengaruh yang signifikan.

Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Yusniyar, 2016) dimana penelitiannya berkesimpulan bahwa pengendalian

intern secara parsial berpengaruh positif terhadap *good governance*. Namun, memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Dhiyavani et al., 2017) dimana penelitiannya berkesimpulan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap penerapan *good governance*.

### **Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap *Good Government Governance* di Direktorat Metrologi Bandung.**

Penelitian ini menggunakan sumber data yang didapat dari data primer dari Direktorat Metrologi Bandung. Berikut pembahasan hasil penelitian standar akuntansi pemerintahan terhadap *good government governance* sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji analisis regresi berganda yang dilakukan dengan menghasilkan sebuah persamaan  $Y = 24.671 - 0,262 X1 + 0,061 X2$  yang menjelaskan bahwa jika variabel Standar Akuntansi Pemerintahan ( $X1$ ) mengalami kenaikan 1, maka *Good government governance* ( $Y$ ) akan mengalami peningkatan sebesar 0,262. Karena koefisien bernilai positif maka terjadi hubungan positif pula antara Standar Akuntansi Pemerintahan ( $X1$ ) terhadap *good government governance* ( $Y$ ). jika variabel Sistem Pengendalian Internal ( $X2$ ) sebesar 0,061 artinya jika variabel Sistem Pengendalian Internal ( $X2$ ) mengalami kenaikan 1, maka *Good government governance* ( $Y$ ) akan mengalami peningkatan sebesar 0,061. Karena koefisien bernilai positif maka terjadi hubungan positif pula antara Sistem Pengendalian Internal ( $X2$ ) terhadap *Good government governance* ( $Y$ ).
2. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang dilakukan dengan mengacu pada kolom model *summary* didapatkan angka sebesar 0,036, maka nilai tersebut mempunyai arti bahwa sebesar 3,6 % variasi dari variabel *good government governance* dapat dipengaruhi oleh Standar Akuntansi Pemerintahan ( $X1$ ) dan Sistem Pengendalian Internal ( $X2$ ). Sedangkan sisanya yaitu 0,964 atau 96,4% dari variabel *good government governance* dipengaruhi oleh variabel lainnya (faktor lain) yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
3. Berdasarkan hasil analisis uji korelasi berganda dapat dijelaskan merujuk pada tabel kategori koefisien korelasi yang mana masuk pada interval korelasi (0,00 – 0,199) maka disimpulkan tingkat hubungan korelasi berganda atau secara simultan dari standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal terhadap *good government governance* mempunyai tingkat hubungan yang sangat lemah. Dengan lemahnya hubungan antar Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap *Good Government Governance*, penerapan ketiga variabel harus di tingkatkan agar terjadi hubungan yang kuat. Dengan meningkatkan penerapan indikator – indikator ketiga variabel.
4. Berdasarkan hasil analisis uji  $f$  secara simultan dapat dijelaskan berdasarkan nilai signifikansi nilai signifikansi sebesar 0,589 yang mana didalam teori pengambilan keputusan  $0,589 > 0,05$  maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan taraf signifikansinya  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan pengujian standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal terhadap *good government governance* di Direktorat Metrologi Bandung. Dari hasil output menghasilkan  $f$  hitung sebesar 0,540 yang mana di dalam teori pengambilan keputusan  $f$  hitung  $0,540 < 3,33$  maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan nilai  $f$  hitung dan  $f$  tabel  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan pengujian standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal terhadap *good government governance* di Direktorat Metrologi Bandung. Dengan lemahnya hubungan antar Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap *Good Government Governance*, penerapan ketiga variabel harus di tingkatkan agar terjadi hubungan yang kuat. Dengan meningkatkan penerapan indikator – indikator ketiga variabel.

Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (D.Sari,2013) dimana penelitiannya berkesimpulan bahwa Secara simultan ketiga variabel berpengaruh positif dan memiliki pengaruh yang sedang atau cukup terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

## KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap *Good Government Governance* di Direktorat Metologi Bandung.
2. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Sistem Pengendalian Internal terhadap *Good Government Governance* di Direktorat Metologi Bandung.
3. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan secara simultan tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan pengujian antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem "Bandung.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPK RI. (2018).Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018
- BPK RI. (2018).Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2018.
- BPK RI. (2019).Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019.
- BPK RI. (2019).Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2019.
- 2010, P. P. N. 71 T. (n.d.). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*.
- Dhiyavani, S., Nasir, A., & Paulus, S. (2017). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Penerapan Good Governance. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1859–1872.
- Hery. (2019). *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*. Gava MEdia.
- Jati, B. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Wahana*, 22(1), 1–14.  
<https://doi.org/10.35591/whn.v22i1.145>
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat.
- Nelson, C. (2016). *Exploring monitoring and evaluation within a good governance perspective: A case study of Stellenbosch Municipality*. *March*, 118.
- Palembang Humas. (n.d.). *Tingkatkan Akuntabilitas Kanwil Sumsel Gelar Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Semester II TA 2019*. <https://sumsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4003-tingkatkan-akuntabilitas-kanwil-kemenkumham-sumatera-selatan-gelar-pra-rekonsiliasi-data-laporan-keuangan-semester-ii-tahun-anggaran-2019>
- Saputri, R. S. (2018). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah/Opd Kabupaten Wonogiri)*.

- Sari, D. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah & Implikasinya Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *Indonesian Journal Of Economics And Business IJEB*, September 2013, 43.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Kedua). Alfabeta.
- TEMPO.CO. (2020). *IHPS II 2019, BPK Ungkap 5.480 Permasalahan Senilai Rp 7,6 T*.  
<https://sumsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4003-tingkatkan-akuntabilitas-kanwil-kemenkumham-sumatera-selatan-gelar-pra-rekonsiliasi-data-laporan-keuangan-semester-ii-tahun-anggaran-2019>
- Yusniyar, D. dan S. A. (2016). Pengendalian Intern Terhadap Good Governance Dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana*, 5(2), 100–115.